



Kepala BPK RI Kalbar Serahkan Jabatan

Borneo Tribune, Pontianak

Usai dilantik 10 September 2013 yang lalu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar Ir Adi Sudiby, MM, Senin (30/9) menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Didi Budi

....Ke Halaman -11

Kepala BPK RI Kalbar Serahkan Jabatan

Satrio, S.H.,M.M., di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar. Penyerahan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar dirangkaikan dengan upacara Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar dan disaksikan oleh Anggota BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E.,Ak.,M.M.,C.P.A.

Sebelum dilantik menjadi Kepala Perwakilan Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua tahun. Didi menggantikan Adi Sudiby yang menempati jabatan baru sebagai Kepala Auditorat VI.B di Jakarta.

Prosesi serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima dan penyerahan buku memori akhir jabatan dari kepala perwakilan lama kepada kepala perwakilan baru.

Anggota BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara memberikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Adi Sudiby yang telah menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan di Pontianak selama hampir tiga tahun dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di wilayah Kalbar. "Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pencapaian opini di wilayah Kalbar," kata Moermahadi Soerja Djanegara.

Anggota BPK RI juga meminta kepada pejabat baru untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata dengan meneruskan dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh kepala perwakilan sebelumnya.

Sehubungan dengan pencapaian opini WTP-DPP oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Pemerintah

Kabupaten Sintang, mengingatkan bahwa LKPD yang baik seharusnya dipandang tidak hanya berujung pada tercapainya opini WTP, tetapi LKPD harus dapat dijadikan instrumen dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi suatu daerah.

"Dengan kualitas laporan keuangan yang baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum akan menjadi lebih baik. Apabila hal ini tidak terjadi, maka capaian LKPD dengan opini WTP tersebut belum mampu digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen dalam pengambilan kebijakan daerah," jelasnya.

Dijelaskannya lagi, BPK menghimbau agar upaya mencapai opini WTP dimaksudkan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem informasi keuangan sehingga dapat digunakan untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi daerah. (Lay).